

Pelaksanaan Aplikasi SRN PPI dalam Pembinaan Kegiatan Program Kampung Iklim oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumatera Selatan (*Implementation of the SRN PPI Application in the Development of Climate Village Program Activities by the South Sumatra Environment and Land Service*)

Anggun Ema

Universitas Sriwijaya

anggunema96@gmail.com



Riwayat Artikel

Diterima pada 23 Februari 2024

Revisi 1 pada 5 April 2024

Revisi 2 pada 28 Juni 2024

Revisi 3 pada 2 Juli 2024

Disetujui pada 5 Juli 2024

Abstract

Purpose: This study aims to determine how the application of the national registry system for climate change control is implemented in the climate village program activities by the Department of Environment and Land, South Sumatra Province.

Research methodology: The research method used is a qualitative research method. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation.

Results: The results of this study indicate that the implementation of the national registration system for climate change control in the development of the climate village program by the Department of the Environment and Land of South Sumatra Province has not been fully implemented in the sub-aspects of adaptation and mitigation activities but in the sub-aspects of those responsible for action, information users, registration, validation and leveraging has been done.

Limitation: adaptation and mitigation activities are needed in the SRN PPI application, and provide detailed information on how to register the SRN PPI application from the registration process to the verification stage.

Contribution: Analysis of the implementation of the national registry system for climate change control using indicators according to the Manual of the National Registry System for Climate Change Control, namely the implementing actors, Types and Sources of Action and Implementation Procedures.

Keywords: *Implementation, Application, SRN, PPI, Development, South, Sumatra, Province*

How to cite: Ema, A. (2024). Pelaksanaan Aplikasi SRN PPI dalam Pembinaan Kegiatan Program Kampung Iklim oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumatera Selatan. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 3(2), 93-112.

1. Pendahuluan

Perubahan iklim disebabkan oleh kegiatan manusia termasuk diantaranya aktivitas industri yang menghasilkan limbah, ketidakpedulian membuang sampah pada tempatnya, pencemaran air sungai, asap dari kendaraan bermotor, pemakaian energi yang berlebihan, pembakaran hutan, dan kegiatan konversi hutan dalam penggunaan lahan. Pengetahuan masyarakat akan menjadi hal krusial untuk menentukan langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang tepat di tingkat tapak (Isdianto & Luthfi, 2020). Selain itu, perubahan iklim dapat menimbulkan resiko yang lebih besar bagi sosial, ekonomi, politik, keamanan pangan dan kesehatan. Kegiatan manusia seperti ini yang menyebabkan peningkatan volume gas rumah kaca berada di udara. Jika volume gas rumah kaca semakin meningkat di atmosfer, panas matahari akan tertahan dan menyebabkan suhu dipermukaan

bumi semakin panas. Jika panasnya bertambah, maka bumi akan mengalami bencana yang hebat seperti cuaca ekstrim yang merusak panen, banjir, kekeringan, krisis air bersih, wabah penyakit dan diikuti rusaknya ekosistem hingga punahnya keberagaman hewan dan tanaman yang berguna bagi manusia. Perubahan iklim diatas perlu diperbaiki agar tidak terjadi kerusakan yang parah. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membuat kebijakan untuk mengatasi masalah perubahan iklim yang terjadi saat ini, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/Menlhk-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (ProKlim) dengan mendorong kerjasama multi-pihak untuk memperkuat kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim). ProKlim adalah aksi bersama adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dapat mensinergikan berbagai pemangku kepentingan (Pemerintah pusat pemerintah daerah, LSM, Akademisi, Dunia Usaha, dan inisiatif lainnya). (Mashur & Meiwanda, 2019)

Komunitas masyarakat biasanya hanya mengandalkan pengalaman dan bukan pada keilmuan perubahan iklim itu sendiri. Sehingga perlu kolaborasi multipihak untuk melayani kebutuhan informasi iklim yang akurat dan lebih dari itu, dapat meminimalisir resiko terhadap bencana penurunan emisi gas rumah kaca (Subair et al., 2014). Adapun syarat pengusulan Program Kampung Iklim (ProKlim) yaitu; pertama, lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah pada tingkat rw dan paling tinggi pada tingkat kelurahan atau desa. Kedua, lokasi yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan sekurang-kurangnya 2 tahun dan telah terbentuk kelompok masyarakat dapat diusulkan sebagai Kampung Iklim. Pendaftaran Program Kampung Iklim pada awalnya melalui offline dengan cara mendaftarkan desa yang bersangkutan ke RW kemudian oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan selanjutnya data diberikan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Namun, hal ini dinilai kurang efektif dikarenakan masih sering terjadinya kesalahan dalam sistem pendataan.

Aplikasi SRN PPI ini berujuk pada berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.71/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim. Sistem Registri Nasional dalam kegiatan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim merupakan sistem pencatatan data dan penyediaan informasi aksi pengendalian perubahan iklim di Indonesia. Dengan adanya Sistem Registri Nasional ini, dapat dihasilkan data dan informasi secara terintegritas dan terstandarisasi. Sasaran Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, dan instansi- instansi terkait lainnya diusulkan sebagai lokasi proklam.



Gambar 1. Perkembangan Lokasi Program Kampung Iklim di Sumatera Selatan tahun 2013-2020
Sumber: Arsip Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020

Berdasarkan gambar diatas yaitu perkembangan lokasi Program Kampung Iklim (Proklim) di Sumatera Selatan setiap tahunnya mengalami naik turun di setiap tahun. Berdasarkan gambar diatas, lokasi Program Kampung Iklim di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, yaitu pada tahun 2013 terdapat 4 lokasi proklim, tahun 2014 meningkat menjadi 6 lokasi, tahun 2015 sebanyak 12 lokasi, pada tahun 2016 meningkat menjadi 17 lokasi, pada tahun 2017 lokasi pendaftar menurun menjadi 11 lokasi proklim, tahun 2018 meningkat sebanyak 24 lokasi tetapi masih rendah dibandingkan tahun 2016, tahun 2019 meningkat menjadi 36 lokasi, pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi 48 lokasi proklim.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan Instruksi Gubernur Sumatera Selatan Nomor:01/INST/DLHP/2017 Tanggal 3 Maret 2017 tentang Pelaksanaan Kampung Iklim Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan yang berisi pembentukan tim koordinasi Proklim Tingkat Kabupaten/Kota, melalui pembinaan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan terus bekerja keras dalam kegiatan program kampung iklim pendaftaran melalui aplikasi Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) agar perkembangan lokasi program kampung iklim meningkat setiap tahunnya. Meskipun Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi SumSel telah menerapkan pembinaan proklim melalui pendaftar SRN PPI sejak awal, masih saja ada permasalahan yang hadir dalam ditengah pelaksanaannya yaitu perkembangan lokasi Proklim naik turun setiap tahunnya dalam pendaftar melalui aplikasi yaitu Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim pada tahun 2017 (Ghina & Zunariyah, 2017). Selanjutnya kondisi desa yang berada dikawasan terbatasnya jaringan memungkinkan pengusul proklim terhambat dalam mengupload data excel melalui aplikasi SRN PPI, dan masih banyak pengusul proklim yang belum siap pada aplikasi pendaftaran proklim melalui SRN PPI dikarenakan kurang mengetahui informasi teknologi. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan program kampung iklim, dan sebagian besar masyarakat desa masih menggunakan bahasa daerah sehingga sulit memahami penjelasan yang sudah di jelaskan, kemudian berdasarkan Tabel 1. jumlah lokasi yang mendapatkan penghargaan sedikit dibandingkan dengan total jumlah desa proklim pada setiap kabupaten/kota.

2. Tinjauan pustaka

2.1 Konsep Manajemen Sektor Publik

(Firdausjah et al., 2023); Keban (2004) mengungkapkan bahwa manajemen publik adalah sebuah penelitian interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* satu sisi, dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain. Berdasarkan beberapa pendapat diatas manajemen publik merupakan suatu upaya pemerintah terhadap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dalam memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sumber daya yang memiliki skill menggunakan pemanfaatan teknologi informasi maupun mesin (Rohman, 2018; Satibi, 2023; Tangkilisan, 2005; A. F. Wijaya & Danar, 2014).

2.2 Konsep Manajemen

Manajemen menurut Hasibuan (2001) adalah *to manage* yang artinya “mengatur”. Manajemen berasal dari kata bahasa inggris *management* yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan dan pengolahan. Manajemen adalah proses dari suatu individu atau kelompok dalam menjalankan tugas untuk mencapai tujuan (Samsu & Mansur, 2019). Bafadhal (2006); (Hamalik, 2007; Terry, 2012) mengatakan bahwa manajemen sebagai proses *of working with and through others to accomplish organizational goals efficiently*. Manajemen sebagai proses kerja melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Manajemen meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pengarahan (*Leading*), dan pengawasan (*controlling*) (Pratama et al., 2023).

Berdasarkan pendapat manajemen yang diberikan para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa Manajemen adalah suatu rangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian baik dalam sumber daya, modal, dan material untuk mencapai keberhasilan yang telah dicapai secara efisien dan efektif.

2.3 Konsep Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI)

Sistem Registri Nasional bertujuan untuk pendataan aksi dan sumber daya Adaptasi dan Mitigasi perubahan iklim di Indonesia, pengakuan pemerintah atas kontribusi berbagai pihak terhadap upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia, penyediaan data dan informasi kepada publik tentang aksi dan sumber daya adaptasi dan mitigasi serta capaiannya, menghindari perhitungan ganda terhadap aksi dan sumber daya adaptasi dan mitigasi sebagai bagian pelaksanaan prinsip clarity, transparency, dan understanding (Wardhana, 2019; Zulkifli, Sari, Prihati, & Rianita, 2022)

Menurut dokumen (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2016:2) Sistem Registri Nasional merupakan sistem pengelolaan dan penyediaan data dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Dengan ketersediaan dan sinergi dari data-data tersebut maka Sistem Registri Nasional dapat menjadi alat pemantau pencapaian komitmen penurunan emisi yang dikomitmenkan oleh Pemerintah Indonesia. Sistem Registri Nasional dikembangkan untuk mengelola data dan informasi berbagai tema aksi dan mobilisasi dukungan pengendalian perubahan iklim di Indonesia sehingga setiap aksi dan mobilisasi dukungan dapat ditelusuri dan terukur kinerja pencapaiannya (Prayitno, Lestari, Hardilla, & Hesti, 2021).

Setiap aksi yang didaftarkan akan dilakukan proses pengecekan untuk melihat kelengkapan dan validitas data dan informasi yang disampaikan sesuai dengan mekanisme validasi data dan informasi SRN. Syarat pendaftaran program kampung iklim melalui sistem registri nasional yaitu pertama, lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah pada tingkat rw dan paling tinggi pada tingkat kelurahan atau desa. Kedua, lokasi yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan sekurang-kurangnya 2 tahun dan telah terbentuk kelompok masyarakat dapat diusulkan sebagai Kampung Iklim. selanjutnya, pengusul yang memenuhi kriteria untuk diverifikasi dan kemudian berhasil melalui proses verifikasi sehingga capaian penurunan emisi dan penggunaan dukungan dari aksi tersebut diakui sebagai bagian dari pemenuhan komitmen penurunan emisi dan juga peningkatan kapasitas adaptasi nasional dan sub-nasional sesuai yang ditargetkan.

Sistem Registri Nasional terbuka untuk semua pelaksana kegiatan pengendalian perubahan iklim baik dari kelompok kepentingan seperti masyarakat, aparatur pemerintah tingkat nasional atau provinsi dan kabupaten/kota hingga sektor swasta yang ingin mendaftarkan kegiatan maupun dukungan pengendalian perubahan iklim yang diinisiasinya (Ismiartha, Santoso, & Hanani, 2021; Septyanun, Julmansyah, Harun, Jaya, & Ariani, 2023). Sistem Registri Nasional memberikan akses terbuka bagi publik sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas dan transparansi data. Dengan ini publik dapat turut memantau capaian kinerja aksi perubahan iklim sesuai dengan target pemenuhan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca baik oleh pemerintah tingkat nasional maupun daerah. Selain itu pengguna dapat membandingkan profil dari aksi iklim per sektor dan profil emisi per provinsi sehingga akan meningkatkan pemahaman akan kondisi lingkungan di Indonesia. SRN merupakan platform komunikasi data aksi pengendalian perubahan iklim di Indonesia. Analisis akan menggunakan pedoman buku aplikasi SRN PPI sebagai penelitian dengan judul Pelaksanaan Aplikasi Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim Dalam Pembinaan Kegiatan Program Kampung Iklim Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. (Thalib & Monantun, 2023), menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif (Pratama et al., 2023).

3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif (Agusta, 2003; Saleh, 2017; Siahaan, 2022; Thalib, Kumadji, Edis, & Saikim, 2023; H. Wijaya, 2019). Kualitatif adalah (Ningwati, Septiyanti, & Desriani, 2022). Data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai macam teknik pengambilan data seperti melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan aplikasi SRN PPI.

4. Hasil dan Pembahasan

Analisis mengenai pelaksanaan aplikasi sistem registrasi nasional pengendalian perubahan iklim dalam pembinaan kegiatan program kampung iklim oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan melakukan wawancara kepada 3 informan dan melakukan observasi ke lapangan serta hasil dokumentasi. Hasil kesimpulan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat diketahui dari 3 aspek pelaksanaan berdasarkan buku pedoman SRN PPI yaitu pelaku penyelenggaraan SRN PPI, jenis aksi dan sumber daya prosedur penyelenggaraan SRN PPI, dan prosedur penyelenggaraan SRN PPI berdasarkan buku pedoman SRN PPI.

4.1 Analisis Pelaku Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim pada Pelaksanaan Aplikasi Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim Dalam Pembinaan Kegiatan Program Kampung Iklim Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

Aspek utama dalam mengetahui pelaksanaan (*actuatinnng*) menurut Tery berdasarkan buku pedoman Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim. analisis pada aspek pelaku penyelenggaraan sistem registri nasional pengendalian perubahan iklim adalah orang yang melakukan pendataan aksi dan sumber daya untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Indonesia.

Adapun sub aspek dalam pelaku penyelenggaraan ini sendiri ada tiga yaitu penanggung jawab aksi, pengelola SRN PPI, dan pengguna informasi. Untuk mendapatkan hasil analisis yang dapat dipertanggungjawabkan serta lebih terarah maka pada aspek pelaku penyelenggaraan sistem registri nasional pengendalian perubahan iklim, peneliti akan menganalisis dimulai dari penanggung jawab aksi kemudian pengelola SRN PPI dan pengguna informasi pada pelaksanaan aplikasi sistem registri nasional pengendalian perubahan iklim dalam pembinaan kegiatan program kampung iklim oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

4.1.1 Analisis Pelaku Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim Penanggung Jawab Aksi pada Pelaksanaan Aplikasi Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim Dalam Pembinaan Program Iklim Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti pada hari Senin, 9 Mei 2022 dan hari Selasa, 10 Mei 2022 mengenai Penanggung Jawab Aksi hal yang ditemukan pada aspek pelaku penyelenggaraan sistem registri nasional pengendalian perubahan iklim dalam pembinaan kegiatan program kampung iklim oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan berupa sosialisasi, rapat koordinasi, dinas luar kota terkait program kampung iklim mengenai aplikasi SRN PPI.

Berikut hasil wawancara oleh peneliti dengan Bapak Fahmi selaku Kepala Seksi Perubahan Iklim Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

“Penanggung jawab aksi penuh itu ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena program kampung iklim ini adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh KLHK sekarang dilimpahkan di balai PPI-KHL Sumsel khusus provinsi Sumatera Selatan. Lalu untuk penanggung jawab dari setiap akun yang mendaftar login yah semua pihak yang terlibat dalam kegiatan aksi adaptasi dan mitigasi baik itu dari pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, instansi-instansi terkait .“

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada aspek pelaku penyelenggaraan sistem registri nasional pengendalian perubahan iklim dengan Kepala Seksi Perubahan Iklim Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa penanggung jawab penuh dalam aplikasi SRN PPI dipegang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setiap wilayah diwakilkan melalui balai PPI-KHL yang bertugas bertanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi SRN PPI. Penanggung jawab aksi dalam kegiatan adaptasi dan mitigasi yaitu semua pihak terlibat mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, dan instansi-instansi terkait. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Ibu Yeni Selaku Pegawai Fungsional Perubahan Iklim Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

“Semua pihak bertanggung jawab, kebijakan itu dimulai dari kementerian turun ke Gubernur, Gubernur membuat kebijakan turunkah ke bupati lalu ke desa. Misalnya untuk desa yang dicalonkan kegiatan aksi adaptasi dan mitigasi yang ada didesa dengan adanya kegiatan adaptasi dan mitigasi dapat mengurangi dampak dari penurunan emisi gas rumah kaca.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada aspek pelaku penyelenggaraan sistem registri nasional pengendalian perubahan iklim dengan pegawai staf fungsional Perubahan Iklim Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa penanggung jawab aksi dalam pengelolaan aplikasi SRN PPI yaitu semua pihak bertanggung jawab dalam kegiatan adaptasi dan mitigasi dengan tujuan dapat mengurangi dampak dari perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Dewi Sukma Selaku Pegawai Fungsional Perubahan Iklim Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

“Ini bertanggung jawab dalam kegiatannya bukan aplikasi. Kalo aplikasinya dari saegi akurat , approve itu admin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Balai PPI-KHIL Wilayah Sumatera. Tapi kalo bertanggung jawab untuk kegiatan adaptasi dan mitigasi itu semua pihak yang dari masyarakat, LSM, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dinas-dinas terkait, semua pihak yang terkait dalam kegiatan ini.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada aspek pelaku penyelenggaraan sistem registri nasional pengendalian perubahan iklim dengan Staf Fungsional Perubahan Iklim Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa penanggung jawab aksi sebagaimana yang dimaksud orang yang bertanggung jawab dalam aplikasi SRN PPI adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Balai PPI-KHL yang mengurus semua data di aplikasi SRN PPI. Penanggung jawab aksi dalam kegiatannya semua pihak yang mendaftarkan diri melalui aplikasi SRN PPI yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, LSM, masyarakat dan dinas-dinas terkait.

Adapun hasil dokumentasi yang dilakukan peneliti untuk penanggung jawab aksi yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Inisiatif lainnya berdasarkan tugas dan wewenang:

Tabel 1. Lokasi proklamasi perKab/Kota di Sumatera Selatan

No	Kab/Kota	Jumlah Desa Proklamasi	Jumlah Desa Penerima Penghargaan Nasional
	Muara Enim	43	5
	Palembang	15	2
	Musi Banyuasin	21	2
	Lahat	9	3
	Banyuasin	9	-
	OKU	8	-
	OKU Timur	4	-
	OKU Selatan	5	-
Lanjutan			
	OKI	25	-

	Musi Rawas	6	1
	Pagaralam	1	-
	Muratara	4	-
	PALI	4	-
	Ogan Ilir	2	-
	Lubuk Linggau	1	-
	Prabumulih	11	-
	Total	168	15

Sumber: Arsip DLHP Provinsi SumSel Tahun 2020

Tabel 2. Penanggung jawab Dunia Usaha Proklam di Sumatera Selatan

No	Nama Dunia Usaha	Jumlah Desa Proklam sampai dengan tahun 2020	Desa Penerima Penghargaan Nasional
1	PT. Bukit Asam Tbk	18	3
2	JOB Pertamina Talisman Jambi Merang	5	2
3	PT. Pusri Tbk	2	1
4	PT. Medco E & P Indonesia	3	1
5	PT. Pertasamtan Gas Prabumulih + PLG	3	1
6	PT. Pertamina RU III	1	1
7	PT. Pertamina Asset 2 Field Adera	3	1
8	Taslimann JOB Baturaja OK	3	-
9	PT. Pertagas Southem Sumatera Area	8	2
10	PT. Bumi Andalas Permai	7	-
11	PT. Bumi Persada Permai	6	-
12	PT. Rimba Hutani Mas	2	-
13	PT. SBA Wood Industries	4	-
14	PT. Tripupa Jaya	2	-
15	PT. Mekar Bumi Hijau	5	-
16	PT. Buluh Cawang Piantation	1	-
17	PT. Pertamina Asset 2 Pendopo File	5	-
18	PT. Sumber Hijau Permai	3	-
19	PT. Semen Batu raja Tbk	1	-
20	PT. Waimusi Agro Indah	1	-
21	PT. Bakti Nugraha Yuda	1	-
22	PT. Pamapersada Nusantara	1	1
23	PT. Green Lahat	1	-
24	PT. Pertamina Asset 2 Limau File	1	-
25	Bank Mandiri	1	-
26	Bank BNI	1	-
27	Rumah Sakit Bunda Prabumulih	1	-
28	PT. Indo Tirta Sukses Perkasa	1	-
29	PT. Tania Selatan	1	-
30	PT. Pertamina Tbk TBBM	1	-
	Jumlah Kemitraan	93	12
	Jumlah Total Lokasi Proklam sampai dengan tahun 2020	168	15
Lanjutan			
	Persentase	55,36	80,00

Sumber: Arsip DLHP Provinsi SumSel Tahun 2020

Pada tabel 3 dijelaskan bahwa jumlah penanggung jawab aksi yang terdaftar dalam aplikasi SRN PPI sebanyak 16 kabupaten/kota dan sebanyak 168 desa program kampung iklim di Sumatera Selatan mendaftarkan sebagai program kampung iklim. Kemudian sebanyak 15 kabupaten/kota yang mendapatkan penerima penghargaan nasional. Hal ini juga ditunjukkan penanggung jawab yang paling intens menggunakan aplikasi SRN PPI adalah kabupaten Muara Enim dengan jumlah Desa Proklamasi sebanyak 43 lokasi. Sedangkan penanggung jawab yang sedikit menggunakan aplikasi SRN PPI terdapat pada kabupaten Lubuk Linggau dan Pagaralam. Sehingga dapat disimpulkan DLHP Provinsi SumSel melakukan pembinaan sebagai bentuk tanggung jawab melalui 16 lokasi Proklamasi.

Pada tabel 4 dijelaskan bahwa jumlah penanggung jawab aksi Dunia Usaha lokasi proklamasi yang terdaftar dalam aplikasi SRN PPI sebanyak 30 kemitraan dan sebanyak 168 desa program kampung iklim di Sumatera Selatan sebagai pendukung dari program kampung iklim. Dunia usaha yang intens menggunakan aplikasi SRN PPI pada PT. Bukit Asam Tbk sebanyak 18 lokasi desa proklamasi sebagai pendukung dari proklamasi. Sedangkan dunia usaha yang sedikit menggunakan aplikasi SRN PPI sebanyak 14 dunia usaha sebagai pendukung proklamasi. Kemudian jumlah desa penerima penghargaan nasional sebanyak 12 penghargaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masih banyak dunia usaha yang belum mendapatkan penghargaan nasional.

Hasil Peneliti pada aspek pelaku penyelenggaraan sistem registri nasional pengendalian perubahan iklim dalam penanggung jawab aksi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Dunia usaha sudah dilaksanakan sesuai dengan tugasnya dalam melaksanakan kebijakan apa yang telah diperintahkan oleh atasan berdasarkan surat tugas menjalankan tugasnya sebagai tanggung jawab. Namun pada penanggung jawab aksi pada lokasi proklamasi kabupaten pagaralam dan Lubuklinggau masih sedikit melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi dalam Aplikasi SRN PPI. Sehingga perlu dilakukan peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal. Ini dapat dicapai melalui penyuluhan, pelatihan, dan workshop yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, dan akademisi.

4.1.2 Analisis Pelaku Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim Pengelola pada Pelaksanaan Aplikasi Sistem Registri Nasional Dalam Pembinaan Kegiatan Program Kampung Iklim Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada hari Senin, 9 Mei 2022 dan hari Selasa, 10 Mei 2022 mengenai pengelola sistem registri nasional pengendalian perubahan iklim yang ditemukan dalam Pelaksanaan Aplikasi Sistem Registri Nasional Dalam Pembinaan Kegiatan Program Kampung Iklim Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan berupa belum adanya pengelola pada pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan sebagai koordinator tingkat provinsi untuk kabupaten yang menjalankan program kampung iklim dan pembinaan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Fahmi selaku Kepala Seksi Perubahan Iklim di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan.

“Sebenarnya pengelola itu ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tapi dilimpahkan lagi ke Balai PPI-KHL Palembang yang mengelola SRN PPI. Disini tugas DLHP hanya sebagai koordinator tingkat provinsi untuk koordinasi kabupaten yang melaksanakan program kampung iklim dan juga mendirikan pembinaan kami ini. Bagaimana sih cara pendaftaran melalui SRN PPI.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada aspek pelaku penyelenggaraan dengan pengelola sistem registri nasional pengendalian perubahan iklim oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa pengelola dalam aplikasi SRN PPI dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai petugas yang melakukan pengelolaan dalam penyelenggaraan SRN PPI, tetapi pada tingkat provinsi yang petugas yang mengelola dilimpahkan di Balai PPI-KHL. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan bertugas sebagai koordinator tingkat provinsi untuk mengkoordinasi kabupaten dalam melaksanakan

program kampung iklim dan pembinaan mendaftarkan kegiatan aksi adaptasi dan mitigasi pada aplikasi SRN PPI. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan ibu Yeni Selaku Staff Fungsional Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

“Pengelola SRN dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Pertanahan Hidup dan Kehutanan, kemudian di Sumatera Selatan ini ada namanya PPI-KHL mereka lah yang mengecek mulai dari pendaftaran, validasi, dan memverifikasi kabupaten dari SRN PPI baru bisa lanjut ke spectrum. Kalo untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumsel ini bukan yang mengelola tapi kami tugasnya cuma membina cakmano caronyo biso pihak yang ingin daftarkan kegiatan aksi adaptasi dan mitigasi ke aplikasi SRN.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada aspek pelaku penyelenggaraan dengan pengelola sistem registri nasional pengendalian perubahan iklim oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa pengelola sistem registri nasional pengendalian perubahan iklim belum dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi. Namun tugas DLHP provinsi Sumatera Selatan sebagai pembina setiap orang yang melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi pada aplikasi SRN PPI. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Dewi Sukma Staf Fungsional Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

“Petugasnya itu adminnya ado, misalnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat keputusan, pokja atau surat penugasan. Kalo dibalai kareno kito daktau kalo dulu masing-masing provinsi kalo sekarang balek ke KLHK. SRN ini dak lagi di provinsi, jadi sekarang dibalai adminnya. Dimano balai nyo itu yo di talang jambe namonyo balai PPI-KHL yaitu petugas yang mengelola aplikasi SRN PPI ini.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada aspek pelaku penyelenggaraan dengan pengelola sistem registri nasional pengendalian perubahan iklim oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa pengelola SRN PPI untuk Provinsi Sumatera Selatan adalah Balai PPI-KHL yang berlokasi di Talang Jambi. Pengelola SRN PPI sebelumnya berada di tingkat provinsi, namun saat ini telah dikembalikan ke KLHK dan dikelola oleh Balai PPI-KHL. Pengelola SRN PPI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola aplikasi SRN PPI, termasuk melakukan pendaftaran, validasi, dan verifikasi data.

Hasil peneliti pada pelaksanaan aplikasi sistem registri nasional pengendalian perubahan iklim dalam pembinaan kegiatan program kampung iklim oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Sumatera Selatan terdapat pengelola sudah dilaksanakan dengan baik oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kemudian Balai PPI-KHL sebagai pengelola SRN PPI berdasarkan surat tugas menjalankan tugasnya sebagai pengelola untuk Provinsi Sumatera Selatan dari tahap pendaftaran, validasi dan verifikasi juga dilaksanakan dengan baik. Namun DLHP Provinsi hanya bertugas sebagai koordinator tingkat provinsi untuk mengkoordinasi kabupaten dan pembina dalam kegiatan aksi adaptasi dan mitigasi program kampung iklim. Sehingga perlu adanya Penguatan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan, kapasitas SDM dan Infrastruktur, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

4.1.3 Analisis Pelaku Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim Pengguna Informasi pada Pelaksanaan Aplikasi Sistem Registri Nasional Dalam Pembinaan Kegiatan Program Kampung Iklim Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada hari Senin, 9 Mei 2022 dan hari Selasa, 10 Mei 2022 mengenai pengelola sistem registri nasional pengendalian perubahan iklim yang ditemukan dalam Pelaksanaan Aplikasi Sistem Registri Nasional Dalam Pembinaan Kegiatan Program Kampung Iklim Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan ditemukan adanya pengguna informasi yang meminta bantuan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan berupa bimbingan teknis di kantor DLHP Provinsi. Berikut hasil wawancara oleh peneliti dengan Bapak Fahmi Selaku Kepala Seksi Perubahan Iklim di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

“Untuk pengguna informasi itu dibuka untuk semua atau pihak publik baik itu masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, masyarakat, dinas-dinas terkait, OPD dan yang ingin mendaftarkan SRN PPI. Jadi untuk pengguna informasi sendiri bisa membuka langsung websitenya buka dipencarian SRN. Disitu juga ada panduan buku aplikasi SRN PPI tata cara mendaftarkan kegiatan proklamasi. Jika pengguna kurang mengerti dalam penjelasan buku pedoman SRN PPI, bisa menghubungi DL Kabupaten, kalau gakbisa bisa menghubungi DLHP Provinsi, kalo gakbisa nanti dilaporkan ke KLHK”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada aspek pelaku penyelenggaraan dengan pengguna informasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa adanya pengguna informasi yang dilakukan dalam pelaksanaan aplikasi SRN PPI dalam pembinaan kegiatan program kampung iklim oleh DLHP provinsi berupa adanya buku panduan dan website yang menjelaskan bagi pengguna informasi mengenai panduan aplikasi SRN PPI. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan ibu Yeni Selaku Staff Fungsional Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

“Untuk informasi sendiri, pengguna informasi yang ada dibuku panduan untuk publik yang terdapat dalam SRN PPI sendiri. Buku ini bisa didownload pada google tentang buku panduan SRN PPI, disana lengkap bagaimana cara pendaftaran sampai tahap verifikasi. Jika pengguna informasi kebingungan makanya ada sosialisasi di kabupaten atau mereka yang koordinasi ke DLHP. Apakah ada kendala dalam pengisian SRN PPI. Dengan adanya sosialisasi diajarkan semua mulai dari tahap pendaftaran dengan cara login dulu dan mendapatkan password.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada aspek pelaku penyelenggaraan dengan pengguna informasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa pengguna informasi dibuka untuk publik dengan mendownload di google mengenai buku panduan SRN PPI. Namun adanya sosialisasi bisa membantu pengguna yang kebingungan dalam buku panduan SRN PPI. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Dewi Staf Fungsional Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

“Pengguna informasi dilakukan boleh untuk semua orang, asal ada username dan password. Kalo dulu itu yang seluruh daerah wilayahnya provinsi SumSel biso jingoknyo, asal tau nama username dan passwordnya. Jadi kalo untuk pengguna yang bingung biso menanyakan ke balai PPI-KHL atau ke Dinas Lingkungan Hidup dan yang mengusulkan itu boleh semua orang asal dio jelas identitasnyo, lembaga, LSM,OPD, pemerintah daerah.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada aspek pelaku penyelenggaraan dengan pengguna informasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa pengguna informasi bisa dilakukan semua orang dalam menggunakan informasi yang terdapat dalam SRN PPI. Namun pengguna kebingungan dalam informasi yang terdapat dalam SRN PPI bisa menghubungi Dinas Lingkungan Hidup atau Balai PPI-KHL. Hasil peneliti pada pelaksanaan aplikasi sistem registri nasional pengendalian perubahan iklim dalam pembinaan kegiatan program kampung iklim oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Sumatera Selatan terdapat pengguna informasi berupa informasi tentang SRN PPI, tata cara pendaftaran, data dan sebaran kegiatan adaptasi dan mitigasi yang terdapat dalam aplikasi sistem registri nasional. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan membina pengguna informasi yang kebingungan dalam pendaftaran SRN PPI berupa sosialisasi tingkat kabupaten atau pengguna informasi. Kemudian pengguna bisa datang langsung ke Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumatera Selatan.

Hasil dari keseluruhan analisis aspek pelaku penyelenggaraan maka dapat dikatakan sudah dilaksanakan. Namun penanggung jawab setiap kabupaten/kota dan Dunia Usaha masih sedikit yang mendaftarkan SRN PPI sebagai lokasi proklamasi.

4.2 Analisis Jenis Aksi dan Sumber Daya Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim pada Pelaksanaan Aplikasi Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim Dalam Pembinaan Kegiatan Program Kampung Iklim Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan

Aspek kedua dalam mengetahui pelaksanaan (*actuating*) menurut Tery berdasarkan buku pedoman Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim. analisis pada aspek Jenis Aksi dan Sumber Daya adalah aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Adapun sub aspek dalam Jenis Aksi dan Sumber Daya ini sendiri ada dua yaitu aksi adaptasi dan aksi mitigasi.

4.2.1 Analisis Jenis Aksi dan Sumber Daya Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim Aksi Adaptasi pada Pelaksanaan Aplikasi Sistem Registri Nasional Dalam Pembinaan Kegiatan Program Kampung Iklim Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada hari Senin, 9 Mei 2022 dan hari Selasa, 10 Mei 2022 mengenai aksi adaptasi yang ditemukan dalam Pelaksanaan Aplikasi Sistem Registri Nasional Dalam Pembinaan Kegiatan Program Kampung Iklim Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan dengan adanya pembinaan setiap kabupaten kota, DLHP Provinsi ikut melakukan kegiatan adaptasi berupa pemanfaatan biogas, penghematan energi, perkebunan, pengendalian kekeringan dan banjir. Berikut hasil wawancara oleh peneliti dengan Bapak Fahmi Selaku Kepala Seksi Perubahan Iklim di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan.

“Itu kan ada di program kampung iklim terdapat tiga komponen. Pertama kegiatan adaptasi masyarakat dapat menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim kuatkan kemampuan dalam menghadapi perubahan iklim seperti pengendalian kekeringan, longsor, dan banjir. Setelah itu ketahanan terhadap iklim pengendalian terhadap penyakit. Kita menjalankan masyarakat agar melaksanakan program dan kegiatan tersebut masyarakat bisa bertahan terhadap dampak dari perubahan iklim. Apasih dampak perubahan iklim itu, misalkan kebanjiran, kekeringan, perubahan musim, kebakaran hutan, kesehatan dan sebagainya”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada aspek jenis aksi dan sumber daya dengan aksi adaptasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa adanya aksi adaptasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim berupa pengendalian kekeringan, longsor, banjir, perubahan musim, kesehatan, dan kebakaran hutan. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan ibu Yeni Selaku Staff Fungsional Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan.

“Program kampung iklim ini merupakan salah satu penghargaan terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan di lingkungan. Terkadang masyarakat itu tidak tahu apa yang dilakukan selama ini bisa mengurangi dampak dari penurunan emisi gas rumah kaca dan bisa mengurangi perubahan iklim, kalo di desa ada tanaman toga. Jadi kegiatan seperti ini banyak penghijauan. Terus lagi menghemat energi dengan menggunakan solar, itu juga bisa kearifan lokal. Dengan kegiatan seperti itu bisa menurunkan emisi gas rumah kaca”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada aspek jenis aksi dan sumber daya dengan aksi adaptasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa aksi adaptasi merupakan program kampung iklim yang mengurangi dampak dari perubahan iklim berupa kegiatan penghijauan, penghematan energi, kearifan lokal, dan ketahanan pangan. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Dewi Sukma Staf Fungsional Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan.

“Aksi adaptasi itu melaksanakan kegiatan tadi, mulai dari merangkul semua pihak dari tingkat desa, dari rumah memilah sampah, mulai dari diri sendiri dari yang kecil, mengajak tetangga. Mulai dari rt/rw, desa kuatkan kemampuan dalam menghadapi perubahan iklim seperti pengendalian kekeringan, longsor, dan banjir. Setelah itu ketahanan terhadap iklim

pengendalian terhadap penyakit. Kita melaksanakan program dan kegiatan tersebut agar masyarakat bertahan terhadap apabila terjadi dampak perubahan iklim itu. Misalnya banjir, kekeringan, perubahan musim, kebakaran hutan dan sebagainya dapat diatasi.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada aspek jenis aksi dan sumber daya dengan aksi adaptasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa aksi adaptasi dapat merangkul semua pihak mulai dari tingkat desa, kabupaten/kota, rt/rw, maupun provinsi dengan meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim melalui kegiatan adaptasi antara lain pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor, peningkatan ketahanan dan pengendalian penyakit terkait iklim.

Adapun hasil dokumentasi yang dilakukan peneliti untuk kegiatan adaptasi berdasarkan Aplikasi SRN PPI:



Gambar 2. Jenis Aksi Adaptasi Di dalam Aplikasi SRN PPI
Sumber: Aplikasi SRN PPI

Pada gambar 2 kegiatan aksi adaptasi ditemukan pada pencarian aplikasi SRN PPI yang melakukan kegiatan adaptasi di desa Kuala Dua Belas Kabupaten OKI SumSel berupa Social Forestry dengan kategori proklim madya. Aksi Adaptasi yang dilakukan desa Kuala Dua Belas mendapatkan nilai indeks kapasitas adaptif 0,43, tingkat kerentanan 3.00 (sedang) dan tingkat kerawanan karhutlah rawan. Sehingga dapat disimpulkan kegiatan adaptasi yang dilakukan desa Kuala Dua Belas Kabupaten OKI masih memiliki nilai yang rendah dengan kategori proklim madya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kabupaten/kota yang melakukan kegiatan adaptasi tercatat penilaian dalam aplikasi SRN PPI. Berdasarkan hasil peneliti pada kegiatan adaptasi yang ada di provinsi Sumatera Selatan sulit ditemukan dalam aplikasi SRN PPI. Selanjutnya untuk melihat seluruh kegiatan penilaian Aplikasi SRN PPI harus mempunyai username dan password. Sehingga dapat disimpulkan kegiatan adaptasi sudah belum sepenuhnya dilaksanakan.

4.2.2 Analisis Jenis Aksi dan Sumber Daya Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim Aksi Mitigasi pada Pelaksanaan Aplikasi Sistem Registri Nasional Dalam Pembinaan Kegiatan Program Kampung Iklim Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada hari Senin, 9 Mei 2022 dan hari Selasa, 10 Mei 2022 mengenai aksi mitigasi yang ditemukan dalam Pelaksanaan Aplikasi Sistem Registri Nasional Dalam Pembinaan Kegiatan Program Kampung Iklim Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan

Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dengan adanya adanya pembinaan setiap kabupaten kota, DLHP Provinsi ikut melakukan kegiatan mitigasi berupa pengelolaan sampah menjadi nilai yang berguna, sumber air terjun menjadi energi listrik, kotoran sapi dimanfaatkan sebagai pembuatan biogas. Berikut hasil wawancara oleh peneliti dengan Bapak Fahmi.

”Aksi Mitigasi itu sendiri upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dari aksi mitigasi ini kita tau bagaimana mengupayakan pengolahan sampah yang baik, bagaimana sih masyarakat disuruh membuang sampah ditempatnya, membuat pengomposan sampah sampai pembuatan 3R sampah menjadi bahan yang bernilai tinggi. Terus kegiatan mitigasi bagaimana pertanian dalam ketahanan pangan rendah emisi. Disana masyarakat bertani dengan membakar bekas jerami karena itu dapat menimbulkan Co2. Bagaimana sih pupuk masyrakat itu menggunakan pupuk organik itu ditingkatkan lagi. Terus ketahanan terhadap energi akan hemat energi, dimana ada potensi mikro itu sebagai listrik banyak dilakukan di daerah lahat banyaknya air terjun sumber-sumber air yang bisa digunakan berbagai mikro energi listrik”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada aspek jenis aksi dan sumber daya dengan aksi mitigasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa aksi mitigasi bisa mengurangi emisi gas rumah kaca berupa pengolahan sampah menjadi 3R, energi listrik dari sumber-sumber air terjun, dan membuat pupuk organik. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan ibu Yeni Selaku Staff Fungsional Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

“Aksi mitigasi sendiri itu kan upaya dari penurunan emisi gas rumah kaca agar dapat berkurang. Dalam kegiatan mitigasi ini itu biso bentuk penanggulangan dampak perubahan iklim, misalnya kalo di desa ada pengelolaan sampah atau ada tanaman toga. Jadi kegiatan seperti ini banyak penghijauan. Terus lagi menghemat energi dengan solar. Dengan kegiatan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, dan juga ada kearifal lokal.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada aspek jenis aksi dan sumber daya dengan aksi mitigasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa aksi mitigasi merupakan upaya menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai bentuk penanggulangan dampak perubahan iklim berupa kegiatan menghemat energi dengan solar, pengelolaan sampah menjadi bahan yang bernilai guna, dan penanaman toga. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Dewi Sukma Staf Fungsional Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

“Kalau mitigasi itu menurunkan emisi gas rumah kaca cakmano dan biso dimanfaatkan. Misalnya kotoran sapi dibuat biogas atau matahari dibuat jadi panel surya dan dimanfaatkan sebagai mikrohidro untuk meningkatkan energi listrik, dari segi perekonomian, segi lingkungan, segi bencana, segi panennyo.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada aspek jenis aksi dan sumber daya dengan aksi mitigasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa aksi mitigasi merupakan upaya menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai bentuk penanggulangan perubahan iklim dan dapat dimanfaatkan berupa meningkatkan energi listrik, meningkatkan perekonomian, dan meningkatkan ketahanan pangan. Adapun hasil dokumentasi yang dilakukan peneliti untuk penanggung jawab aksi yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Inisiatif lainnya berdasarkan tugas dan wewenang:

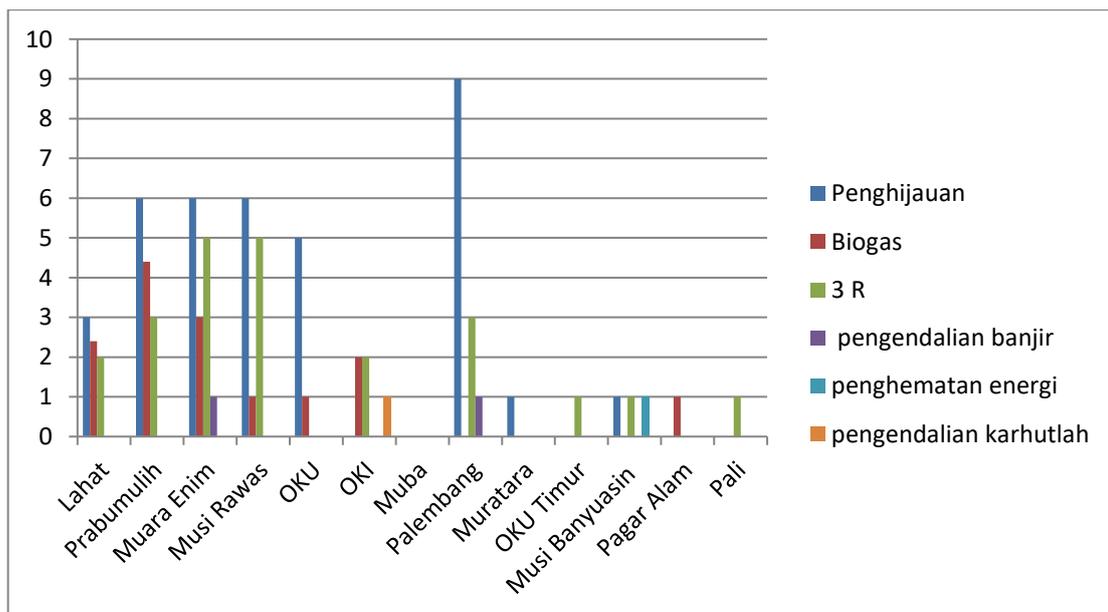
Tabel 2. Daftar Kegiatan Mitigasi Penerima Penghargaan Tropy, Sertifikat dan Insentif Tahun 2018-2019

NO	Nama Lokasi	Kegiatan Unggulan	Pendukung
1	Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat Lahat Provinsi SumSel (2018)	Desa Ekowisata, Penhijauan, Waratani	PT. Bukit Asam Persero Tbk

2	Desa Keban Agung Kecamatan lawang kidul Muara Enim Provinsi SumSel (2018)	Biogas, Kompos, 3R	PT. Pama Persada Nusantara
3	Desa Pangkul Kecamatan cambai kota Prabumulih Provinsi SumSel (2018)	Pemanfaatn lahan perkarangan, Pupuk Organik, bank sampah	PT. Pertasamtan Gas
4	Desa Sidomulyo Kecamatan Gunung Megang Muara Enim Provinsi SumSel (2019)	Desa ekowisata, pemanfaatan lahan pekarangan Pertanian organik, pupuk organik, 3R	PT. Pertagas Southern Sumatera Area
5	Desa Suka Makmur Kecamatan BTS ULU Kabupaten Musi Rawas Provinsi SumSel (2019)	Padi Organik wanatani, Pupuk organik	PT. Medco E & P Indonesia

Sumber: Dokumen Arsip DLHP tahun 2019.

Pada tabel 5 diatas menunjukkan adanya daftar kegiatan mitigasi penerima penghargaan trophy, sertifikat dan insentif tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Kegiatan mitigasi penerima penghargaan trophy, sertifikat dan insentif Tahun 2018 sebanyak 3 kegiatan unggulan pada kabupaten Lahat dan Prabumulih. Sedangkan tahun 2019 sebanyak 2 kegiatan unggulan pada kabupaten Muara Enim dan Musi Rawas.



Gambar 3. Perkembangan Kegiatan adaptasi dan Mitigasi Setiap Kabupaten Kota Tahun 2016- 2018
Sumber: Arsip Dokumen DLHP Provinsi Sumsel Tahun 2019

Pada gambar 3 menunjukkan kegiatan adaptasi dan mitigasi untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, dimana lokasi proklamasi yang banyak melakukan kegiatan adaptasi pada kota Palembang sebanyak 9 dalam kegiatan penghijauan. Kemudian kegiatan adaptasi yang paling sedikit melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi hampir setiap kabupaten/kota. Sehingga dapat disimpulkan masih banyak yang belum melaksanakan kegiatan adaptasi dan mitigasi pada setiap kabupaten/kota. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan dari seluruh subaspek jenis dan sumberdaya aksi bahwa belum sepenuhnya dilaksanakan. Setiap kabupaten/kota memiliki kegiatan adaptasi dan mitigasi yang berbeda-beda setiap lokasi proklamasi. Selanjutnya kegiatan adaptasi dan mitigasi tidak menunjukkan keseluruhan data karena berdasarkan wawancara kegiatan adaptasi dan mitigasi perlu adanya akun SRN PPI untuk bisa melihat seluruh kegiatan adaptasi dan mitigasi dalam aplikasi SRN PPI.

4.3 Analisis Prosedur Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim pada Pelaksanaan Aplikasi Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim Dalam Pembinaan Kegiatan Program Kampung Iklim Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan

Aspek ketiga dalam mengetahui pelaksanaan (*actuating*) menurut Tery berdasarkan buku pedoman Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim. Adapun sub aspek Prosedur Penyelenggaraan dalam ini sendiri ada tiga yaitu pendaftaran, validasi data, dan verifikasi aksi dan sumber daya.

4.3.1 Analisis Prosedur Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim Pendaftaran pada Pelaksanaan Aplikasi Sistem Registri Nasional Dalam Pembinaan Kegiatan Program Kampung Iklim Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada hari Senin, 9 Mei 2022 dan hari Selasa, 10 Mei 2022 mengenai prosedur penyelenggaraan SRN PPI yang ditemukan dalam Pelaksanaan Aplikasi Sistem Registri Nasional Dalam Pembinaan Kegiatan Program Kampung Iklim Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan dengan adanya pendaftaran aplikasi SRN PPI melalui sosialisasi, dinas luar kota DLHP Provinsi dan rapat koordinasi antar kabupaten kota. Berikut hasil wawancara oleh peneliti dengan Bapak Fahmi Selaku Kepala Seksi Perubahan Iklim di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan.

“Semua orang bisa mendaftar baik itu dunia usaha, pemerintah daerah dan pusat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota, DLHP provinsi, dan lain-lain. Bagaimana sih pendaftarannya. Kami biasanya menjadi koordinator DLHP Provinsi ini dan yang mempunyai akun itu DL Kabupaten. Kami mendaftarkan di SRN PPI kan ada prosedurnya kita daftarkan dulu. Kita isi data identitas, usernamena misalnya DLHP Provinsi SumSel, passwordnya apa, lembaga misalnya pemerintah daerah. Disana baru diregistrasi oleh KLHK masuk ke email. Lalu bisa kita mendaftarkan ke SRN PPI”

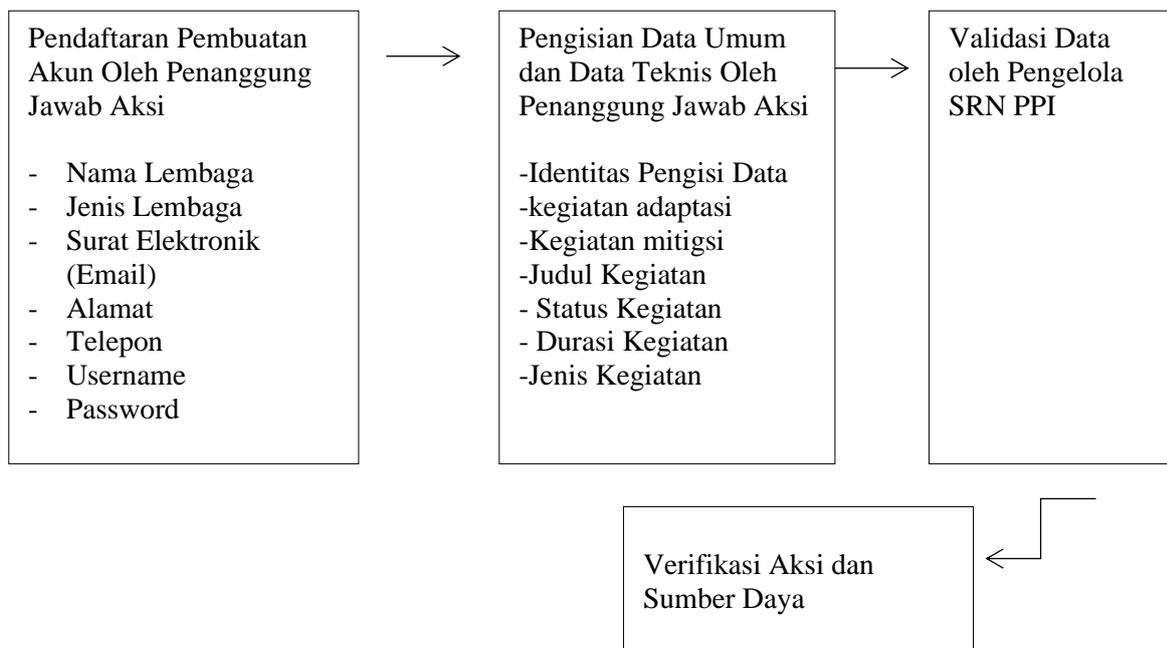
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada aspek prosedur penyelenggaraan SRN PPI dalam pendaftaran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa pendaftaran dilakukan semua pihak yaitu dunia usaha, pemerintah pusat, pemerintah daerah, DLHP Provinsi, dan lain-lain. Pada pendaftaran mempunyai tahapan berupa pengisian data identitas, username, dan password. Selanjutnya diregistrasi melalui informasi yang terdapat dari email Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan ibu Yeni Selaku Staff Fungsional Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan.

“Untuk pendaftaran sendiri dilakukan oleh lembaga terkait, bisa dilakukan orang desa, bisa dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait, bisa juga perusahaan yang sebagai memberikan bantuan sebagai CSR. Jadi boleh orang perusahaan yang mendaftarkan boleh dari desa maupun Dinas Lingkungan dengan catatan DLHP tetap memantau dalam pendaftaran tersebut tingkat kabupaten. Jadi pendaftaran itu didaftarkan misal dari Dinas Lingkungan Hidup kabupaten disebutkan kabupaten apa. Nanti disitu diisi emailnya, nomor kontak orang yang bisa dihubungi. Setelah itu username dan passwordnya dibuat, nanti di submit langsung kita cek email yang dikirimkan lalu sudah disetujui dari pihak pusat baru bisa dibuka aplikasi SRN.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada aspek prosedur penyelenggaraan SRN PPI dalam pendaftaran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa pendaftaran dilakukan oleh lembaga terkait, orang desa, dinas lingkungan kabupaten, perusahaan yang memberikan bantuan. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian mempunyai tugas yaitu memantau dalam proses pendaftaran SRN PPI tingkat kabupaten kota. Pada pendaftaran mengisi data berupa email, nomor telepon, username dan password dengan mengklik submit yang ada pada aplikasi SRN PPI. Pengisian data yang sudah di submit menunggu persetujuan dari pihak pusat melalui email. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Dewi Sukma Staf Fungsional Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan.

“ketika kito buka SRN PPI, kita daftar itu identitasnyo jelas namonyo apo, dari lembaga mano, nomor handphone, alamat. Dan itu kalo sudah daftar kagek dapat nomor registrasi. Dan itu kalo kito sudah registrasi keluar identitas kito. Makonyo dak biso abal-abal harus jelas identitasnyo.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada aspek prosedur penyelenggaraan SRN PPI dalam pendaftaran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa pendaftaran bisa dibuka melalui aplikasi SRN PPI melalui beberapa langkah dengan mengisi identitas yang jelas berupa nama lembaga, nomor handphone dan alamat. Setelah melakukan pengisian identitas yang lengkap pihak yang mendaftar akan mendapatkan nomor registrasi.



Gambar 4. Bagan Mekanisme Penyelenggaraan SRN PPI
Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan hasil peneliti pada pelaksanaan aplikasi sistem registri nasional pengendalian perubahan iklim dalam pembinaan kegiatan program kampung iklim oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Sumatera Selatan pada pendaftaran sudah dilaksanakan dengan cukup baik dengan adanya pembuatan akun untuk bisa login aplikasi SRN PPI melalui beberapa langkah dengan mengisi identitas yang jelas berupa nama lembaga, narahubung, dan akun. Namun pada pendaftaran proklamasi terdapat kendala yaitu menunggu jadwal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sehingga memerlukan waktu bagi pendaftar dalam mendaftar program iklim melalui aplikasi SRN PPI.

4.3.2 Analisis Prosedur Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim Validasi Data pada Pelaksanaan Aplikasi Sistem Registri Nasional Dalam Pembinaan Kegiatan Program Kampung Iklim Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada hari Senin, 9 Mei 2022 dan hari Selasa, 10 Mei 2022 mengenai prosedur penyelenggaraan SRN PPI yang ditemukan dalam Pelaksanaan Aplikasi Sistem Registri Nasional Dalam Pembinaan Kegiatan Program Kampung Iklim Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dengan adanya validasi berupa belum adanya DLHP yang bertugas dalam memvalidasi data aplikasi SRN PPI karena yang memvalidasi semua data dalam aplikasi SRN PPI yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Berikut hasil wawancara oleh peneliti dengan Bapak Fahmi Selaku Kepala Seksi Perubahan Iklim di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

“Data umum dan data teknis dilakukan oleh pengusul. Pengusul itu yang ada di lokasi proklamasi bisa di desa bisa di rw, tapi dibimbing oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota. Kan ada macam-macam data ada data lokasi, ada data pendukung, misal data lokasi itu siapa yang bertanggungjawab dan dilokasi itu namanya siapa, identitasnya yang lengkap dan sebagainya. Nanti sudah diisi lokasi muncul berdasarkan petanya tinggal diklik saja. Terus isi data pendukung yaitu data dokumen dan bukti foto. Untuk data teknis ada di excel itu ada tiga kegiatan yaitu aksi adaptasi, mitigasi dan kelembagaan masyarakat itulah yang diisi. Misalnya mengenai tanah longsor ada enggak disitu, permanen air hujan, bertani tanaman organik. Kalo semua kegiatan ini sudah diisi baru di validasi oleh pihak KLHK”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada aspek prosedur penyelenggaraan SRN PPI dalam pendaftaran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa validasi data dengan mengisi pengisian data umum yang dilakukan pengusul berupa identitas yang lengkap serta dokumen foto dan juga data teknis berupa pengisian data excel sejauh mana kegiatan adaptasi dan mitigasi dilakukan. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan ibu Yeni Selaku Staff Fungsional Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

“Untuk validasi data sendiri itu, kita yang tadinya sudah mengisi semua mulai dari proses pendaftaran mengisi identitas yang lengkap misalnya itu nama lembaganya, lokasi, nomor handphone, habis itu mengisi kegiatan adaptasi dan mitigasi serta foto-foto bukti kegiatan yang dilakukan itu misal kegiatan adaptasi tadi diisi dan kegiatan mitigasinya itu apa diisi juga. Kalo sudah selesai barulah di validasi oleh KLHK dan dilanjutkan tahap verifikasi.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada aspek prosedur penyelenggaraan SRN PPI dalam pendaftaran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa validasi dalam pelaksanaan aplikasi SRN PPI melakukan pengisian data berupa data identitas, kegiatan adaptasi, kegiatan mitigasi dan hasil bukti kegiatan adaptasi dan mitigasi. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Staf Fungsional Ibu Dewi Sukma Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

“Kalo sekarang itu dio selain di SRN PPI, ada upload semua data excel, data gambar-gambar samo spektrum. Bener dak sih kegiatan ini ado, berapa nian jumlah kegiatan-kegiatan itu dimasukkan kedalam aplikasi SRN PPI. Kegiatan-kegiatan itu tadi langsung ado di link. Orang pusat itu bisa melihat bener data ini, jumlahnya berapa batang, upload gambar-gambar yang jelas. Jadi validasi itu bener apo idaknyo data-data yang dimasukkan. Dari pendaftaran sampe tahap verifikasi ini butuh waktu dalam approve pihak pusat karno terbataasnyo sdm jadi butuh waktu. Selain itu juga dalam upload kegiatan adaptasi dan mitigasi kito harus punya jaringan yang kuat.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada aspek prosedur penyelenggaraan SRN PPI dalam pendaftaran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa validasi dalam pelaksanaan aplikasi SRN PPI melakukan upload semua data excel berupa gambar-gambar sesuai dengan kegiatan adaptasi dan mitigasi yang dilakukan dengan data yang ada didalam SRN PPI untuk di validasi, namun proses validasi membutuhkan waktu persetujuan dari KLHK dikarenakan terbatasnya SDM. Pada proses penguploadan kegiatan adaptasi dan mitigasi membutuhkan jaringan yang kuat agar pada saat proses upload bisa diterima.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa validasi dalam sistem registri nasional pengendalian perubahan iklim menunjukkan hasil dari validasi melalui notifikasi email untuk mendapatkan nomor akun untuk ke tahap selanjutnya yaitu verifikasi. Namun masih terdapat kendala yaitu keterbatasan pada Sumber Daya Manusia dan keterbatasan jaringan yang membuat kendala pada upload data sehingga memerlukan waktu untuk validasi data.

4.3.3 Analisis Prosedur Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim Verifikasi Aksi dan Sumber Daya pada Pelaksanaan Aplikasi Sistem Registri Nasional Dalam Pembinaan Kegiatan Program Kampung Iklim Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada hari Senin, 9 Mei 2022 dan hari Selasa, 10 Mei 2022 mengenai prosedur penyelenggaraan SRN PPI yang ditemukan dalam Pelaksanaan Aplikasi Sistem Registri Nasional Dalam Pembinaan Kegiatan Program Kampung Iklim Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan adanya verifikasi offline melalui pembinaan penilaian program kampung iklim berdasarkan surat tugas, tetapi pada verifikasi dalam aplikasi SRN PPI tidak ada dikarenakan orang yang memverifikasi data dalam aplikasi SRN PPI yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berikut hasil wawancara oleh peneliti dengan Bapak Fahmi Selaku Kepala Seksi Perubahan Iklim di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan.

“Dari validasi tadi barulah diverifikasi. Itukan ada empat kriteria proklam. Proklam pertama nilainya dibawah 50% kebawah, proklam madya nilainya 50-80 %, proklam utama nilainya 81%, dan proklam lestari itu dinilai paling tinggi. Apabila nilainya termasuk kategori madya dan pratama dia belum diverifikasi dan itu perlu dibina supaya nilainya tinggi. Program-program apa, aksi adaptasi dan mitigasi yang belum ada di masyarakat kita adakan baik itu dana pemerintah, dana desa maupun CSR sehingga dilakukan pembinaan pada nilai yang kecil dan nilai yang besar diverifikasi oleh Balai PPI-KHL. Kalo sudah diverifikasi maka adanya verifikasi lapangan atau offline berdasarkan hasil nilai apakah sudah mencapai nilainya itu dengan baik.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada aspek prosedur penyelenggaraan SRN PPI dalam pendaftaran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa verifikasi berupa hasil penilaian kegiatan adaptasi dan mitigasi dengan empat kategori yaitu proklam pratama dibawah 50%, proklam madya 50-80%, proklam utama 81% dan proklam lestari dengan nilai tertinggi. Verifikasi dilakukan secara offline pada penilaian proklam madya dan pratama perlu dibina melalui koordinator yaitu DLHP Provinsi dan pada proklam utama dan lestari diverifikasi oleh Balai PPI-KHL. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan ibu Yeni Selaku Staff Fungsional Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan.

“Verifikasi itu pemeriksaan kesesuaian data yang diisi oleh pendaftar tadi sesuai apa idak data yang dimasukkan dalam pengisian data itu mulai dari identitas, nomor hp, alamat, pengisian kegiatan adaptasi dan mitigasi tadi, yang verifikasi ini itu dari KLHK sendiri.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan disimpulkan bahwa verifikasi telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan adanya pemeriksaan data yang sesuai dalam pengisian data identitas yang lengkap dan kegiatan adaptasi dan mitigasi yang benar dapat diverifikasi. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Dewi Sukma Staf Fungsional Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan.

“Verifikasi sumber daya dio itu misalkan di excel dilihat kan biso dijingok per item apa benar ada kelompok ini, ada rapatnya, programnya apo, buktinya sudah jelas, struktur organisasinya jugo lengkap, jadi harus ada bukti-bukti dilampirkan itu datanya. Kalau sudah dilihat disitu baru diverifikasi.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada aspek prosedur penyelenggaraan SRN PPI dalam pendaftaran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa verifikasi sumber daya dilihat dari kebenaran data berupa kelompok, rapat, program kegiatan adaptasi dan mitigasi, struktur organisasi dan bukti pendukung dalam kegiatan adaptasi dan mitigasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan aplikasi SRN PPI dalam pembinaan Proklam di Provinsi Sumatera Selatan masih terkendala oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan belum

memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola dan memantau SRN PPI. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti jaringan internet dan komputer juga masih terbatas di beberapa daerah, kurangnya sosialisasi dan pelatihan. Masih banyak masyarakat dan pemangku kepentingan yang belum mengetahui tentang SRN PPI dan bagaimana cara menggunakannya. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi dalam pengisian data SRN PPI dan kendala teknis. Aplikasi SRN PPI masih memiliki beberapa kendala teknis, seperti sulitnya diakses dan lambatnya proses pengisian data. Hal ini menyebabkan frustrasi bagi pengguna dan menghambat kelancaran pelaksanaan program.

Meskipun terdapat beberapa kendala, namun pelaksanaan aplikasi SRN PPI dalam pembinaan Proklam di Provinsi Sumatera Selatan juga menunjukkan beberapa kemajuan antara lain meningkatnya jumlah kampung iklim yang terdaftar di SRN PPI, meningkatnya kualitas data dan informasi tentang aksi pengendalian perubahan iklim di Provinsi Sumatera Selatan

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Aplikasi Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim Dalam Pembinaan Kegiatan Program Kampung Iklim Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sudah dilaksanakan dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari aspek-aspek pelaksanaan berdasarkan buku pedoman antara lain seperti Pelaku Penyelenggaraan pada subaspek penanggung jawab, pengelola dan pengguna informasi sudah dilaksanakan namun pada penanggung jawab pada jumlah lokasi proklam di kabupaten/kota pagaralam dan lubuklinggau seikit dikarenakan masih perlu nya penambahan lokasi desa setiap kabupaten/kota; Jenis Aksi dan Sumber Daya baik pada kegiatan adaptasi dan mitigasi belum sepenuhnya dilaksanakan. Kegiatan adaptasi dan mitigasi setiap kabupaten/kota tidak bisa menampilkan secara keseluruhan dalam aplikasi SRN PPI karena membutuhkan akun SRN PPI dan Prosedur Penyelenggaraan pada subaspek pendaftaran, validasi dan verifikasi sudah dilaksanakan. Namun pada jadwal pendaftaran SRN PPI ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sehingga diperlukan waktu untuk mendaftarkan kegiatan adaptasi dan mitigasi dalam aplikasi Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim.

5.2 Saran

Peneliti merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan pelaksanaan SRN PPI yaitu dengan meningkatkan lagi tanggung jawab dalam melakukan program kampung iklim dalam perkembangan lokasi proklam pada setiap kabupaten/kota, Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pihak terkait mengenai penggunaan aplikasi SRN PPI, perlu kegiatan adaptasi dan mitigasi dalam aplikasi SRN PPI, dan membina memberitahu secara rinci cara pendaftaran aplikasi SRN PPI pada proses pendaftaran sampai pada tahap verifikasi.

Referensi

- Agusta, I. (2003). Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27(10), 179-188.
- Bafadhal, I. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen And Servei Taman Kanak-Kanak*. Jakarta; Bumi Akasara.
- Firdausijah, R. T., Alaslan, A., Mustanir, A., Abdurohim, A., Sunariyanto, S., Fauzan, R., . . . Amane, A. P. O. (2023). *Manajemen Sektor Publik: Pt Global Eksekutif Teknologi*.
- Ghina, N. Y., & Zunariyah, S. (2017). Kampung Iklim : Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Sosiologi Dilema*, 32(2).
- Hamalik, O. (2007). *Manajemen Pengembangan Kurikulum*.
- Hasibuan, M. R. (2001). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sosial (Social Disclosures) Dalam Laporan Tahunan Emitmen Di Bursa Efek Jakarta Dan Bursa Efek Surabaya*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Isdianto, A., & Luthfi, O. M. (2020). Persepsi Dan Pola Adaptasi Masyarakat Teluk Popoh Terhadap Perubahan Iklim. *Jurnal Ilmu Kelautan Spermonde*, 5(2).

<https://doi.org/10.20956/jiks.v5i2.8935>

- Ismiartha, G. R., Santoso, R. S., & Hanani, R. (2021). Analisis Stakeholders Dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Program Kampung Iklim (Proklim) Sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Dusun Soka, Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 10(2), 86-103.
- Keban, Y. T. (2004). Pokok-Pokok Pikiran Perbaikan Sistem Manajemen Sdm Pns Di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 8(2), 15-33.
- Ningwati, G., Septiyanti, R., & Desriani, N. (2022). Pengaruh Environment, Social And Governance Disclosure Terhadap Kinerja Perusahaan. *Goodwood Akuntansi Dan Auditing Reviu*, 1(1), 67-78.
- Pratama, B., Yuliansyah, R., Hartanti, D., Khaerul, S., Amaliati, D., Krisnando, K., & Shenurti, E. (2023). Resources, Events & Agents (Rea) Sebagai Solusi Pada Siklus Pendapatan & Pengeluaran Kas: Tinjauan Empiris. *Goodwood Akuntansi Dan Auditing Reviu*, 2(1), 39-47.
- Prayitno, H., Lestari, R., Hardilla, D., & Hesti, H. (2021). Assistance For Waste Management Of The Jasmine Jaya Cooperative In Supporting Sustainable City. *Yumary: Jurnal Pengebodian Kepada Masyarakat*, 1(03), 151-162.
- Rohman, A. (2018). Dasar-Dasar Manajemen Publik.
- Saleh, S. (2017). Analisis Data Kualitatif: Pustaka Ramadhan, Bandung.
- Samsu, S., & Mansur, M. (2019). Manajemen Dakwah Lembaga Dakwah Kampus Unit Pengkajian Mahasiswa Islam (Ldk-Upmi) Iain Kendari. *Al-Munzir*, 12(1), 131-148.
- Satibi, I. (2023). Manajemen Publik Dalam Perspektif Teoritik Dan Empirik: Unpas Press.
- Septyanun, N., Julmansyah, J., Harun, R. R., Jaya, I., & Ariani, Z. (2023). Regulasi Dan Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon Berbasis Voluntary Dan Mandatory Di Nusa Tenggara Barat. *Geography: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 11(2), 399-411.
- Siahaan, M. (2022). Dampak Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Masyarakat, Lingkungan Dan Pemerintah. *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 1(2), 113-125.
- Subair, Kolopaking, L. M., Adiwibowo, S., & Pranowo, M. B. (2014). Adaptasi Perubahan Iklim Komunitas Desa: Studi Kasus Di Kawasan Pesisir Utara Pulau Ambon. *Komunitas: International Journal Of Indonesian Society And Culture*, 6(1). <https://doi.org/10.15294/komunitas.v6i1.2943>
- Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen Publik*: Grasindo.
- Terry, G. R. (2012). Asas-Asas Manajemen Edisi Kedelapan. *Terjemahan Winardi. Bandung: Pt Alumni*.
- Thalib, M. A., Kumadji, D., Edis, E., & Saikim, F. S. (2023). Refleksi Nilai Huyula Di Balik Praktik Akuntansi Oleh Pengusaha Depot Air Minum. *Goodwood Akuntansi Dan Auditing Reviu*, 2(1), 49-59.
- Wardhana, I. W. (2019). Governance And Stakeholder Dalam Isu Perubahan Iklim. *Suatu Pengantar*, 13.
- Wijaya, A. F., & Danar, O. R. (2014). *Manajemen Publik: Teori Dan Praktik*: Universitas Brawijaya Press.
- Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Zulkifli, A., Sari, F. M., Prihati, P., & Rianita, D. (2022). Penguatan Kelembagaan Dan Inventarisasi Aksi Iklim Melalui Praktik Pengisian Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim. *Jmm (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(2), 1269-1282.